



Konflik Identitas Dan Tantangan Integrasi Sosial Di Papua Selatan: Studi Sosial Budaya Dan Politik

Wulandari Renyaan¹, Nur Jalal²

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus

²Ilmu Administasi Negara Universitas Musamus

wulandarirenyaan2003@email.com, nurjalal242@gmail.com

Received: 08-01-2025

Accepted: 09-08-2025

Published: 15-09-2025

Abstrak

Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.

Kata kunci: Papua Selatan, konflik identitas, integrasi sosial

PENDAHULUAN

Papua Selatan, sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran wilayah Papua, menyimpan kompleksitas sosial yang unik dan dinamis. Wilayah ini merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis Papua yang memiliki sejarah panjang, struktur sosial tradisional yang kuat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, proses migrasi internal yang terjadi sejak era Orde Baru hingga masa kini telah membawa masuk populasi pendatang dari berbagai wilayah Indonesia. Perjumpaan antara masyarakat asli Papua dengan kelompok pendatang ini tidak hanya melahirkan interaksi sosial dan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketegangan identitas yang berlarut-larut dan, dalam beberapa kasus, bermuara pada konflik sosial terbuka.

Konflik identitas yang terjadi di Papua Selatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah politik yang lebih luas. Kebijakan sentralisasi di masa lalu yang kurang mempertimbangkan keberagaman lokal, ditambah dengan persepsi dominasi kelompok pendatang dalam sektor ekonomi dan birokrasi, telah memperkuat perasaan terpinggirkan dikalangan masyarakat asli. Dalam banyak kasus, masyarakat Papua

merasa kehilangan ruang kultural dan politik di tanahnya sendiri. Hal ini diperparah dengan minimnya dialog antar komunitas serta kegagalan institusi formal dalam menjembatani kepentingan yang berbeda. Akibatnya, identitas menjadi sumber ketegangan, bukan jembatan pengikat antar kelompok sosial.

Sejak era Orde Baru, wilayah Papua mengalami arus migrasi yang masif melalui kebijakan transmigrasi dan integrasi nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan signifikan dalam struktur demografis dan sosial, terutama di kota-kota besar seperti Merauke. Kelompok pendatang kini mendominasi sektor-sektor strategis seperti perdagangan, pendidikan, hingga birokrasi. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, representasi politik, dan pengakuan budaya yang memperkuat perasaan termarginalisasi di kalangan masyarakat adat.

Dari sudut pandang sosial budaya, masyarakat Papua Selatan memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan, tanah adat, dan struktur marga yang berperan penting dalam membentuk identitas kolektif mereka. Namun, modernisasi yang tidak disertai dengan pendekatan budaya yang sensitif kerap kali menimbulkan gesekan. Pembangunan yang berbasis pada paradigma ekonomi semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal sering kali dianggap sebagai bentuk kolonialisasi baru. Hal ini memperkuat resistensi terhadap integrasi sosial, karena masyarakat merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pembangunan.

Sementara itu, dari sisi politik, desentralisasi dan otonomi khusus yang seharusnya memberikan ruang partisipasi lebih besar bagi masyarakat Papua, sering kali tidak berjalan efektif. Representasi politik masyarakat adat di berbagai tingkat pemerintahan masih terbatas, dan kebijakan yang dihasilkan sering kali belum mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Ketidakpuasan ini turut memperdalam jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta memunculkan narasi-narasi identitas yang bersifat eksklusif.

Tantangan integrasi sosial di Papua Selatan menjadi semakin kompleks ketika kita melihat bagaimana identitas digunakan sebagai alat politik, baik oleh aktor lokal maupun nasional. Identitas tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperoleh legitimasi, kekuasaan, dan sumber daya. Dalam situasi ini, integrasi sosial tidak cukup hanya dengan menciptakan ruang pertemuan antar kelompok, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan yang adil, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta penghormatan terhadap keberagaman kultural yang ada.

Dalam kerangka itu, konflik identitas dan tantangan integrasi sosial di Papua Selatan harus dipahami sebagai gejala dari persoalan struktural yang lebih luas. Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor sejarah, ekonomi, budaya, dan politik berkelindan dalam menciptakan fragmentasi sosial di Papua Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial-budaya dan politik, yang

memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap dinamika identitas serta peluang untuk membangun integrasi sosial yang lebih inklusif dan adil.

Melalui studi ini, penulis berupaya mengeksplorasi secara komprehensif dinamika konflik identitas dan tantangan integrasi sosial di Papua Selatan dengan pendekatan sosial budaya dan politik. Pendekatan ini dianggap relevan untuk membongkar akar persoalan secara mendalam dan tidak semata melihat konflik sebagai akibat dari perbedaan semata, melainkan sebagai produk dari relasi kuasa, sejarah marginalisasi, dan kegagalan kebijakan publik. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan strategi integrasi sosial yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan—serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat Papua Selatan yang harmonis dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam fenomena sosial yang kompleks, seperti konflik identitas dan integrasi sosial di Papua Selatan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dari perspektif aktor-aktor lokal serta dinamika sosial-budaya yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau statistik.

Proses penelitian dimulai dengan pemetaan isu-isu utama yang terkait dengan konflik identitas di Papua Selatan, berdasarkan pengamatan terhadap kondisi sosial-politik di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti menelusuri berbagai narasi yang berkembang di masyarakat melalui dokumentasi publik, laporan lembaga, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan sejarah, migrasi, pembangunan, dan relasi kuasa di Papua. Narasi-narasi ini kemudian dikaji secara kritis untuk mengidentifikasi pola-pola ketegangan dan respons yang muncul dalam masyarakat.

Penelitian ini juga mengandalkan pemahaman terhadap konteks sosial Papua Selatan secara utuh—yakni dengan mempertimbangkan faktor sejarah kolonialisme, kebijakan nasional yang sentralistik, pemekaran wilayah, dan proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat adat. Dalam proses eksplorasi, peneliti berupaya menggali keterkaitan antara pergeseran identitas budaya, perebutan ruang ekonomi, dan politik representasi. Berbagai sumber naratif seperti testimoni tokoh adat, pernyataan tokoh gereja, laporan tahunan LSM lokal, serta liputan media digunakan sebagai bahan reflektif untuk membaca dinamika hubungan antara kelompok masyarakat adat dan pendatang.

Fokus penelitian diarahkan pada wilayah-wilayah yang menjadi titik temu penting antara kelompok lokal dan migran, seperti Merauke dan Tanah Miring. Pemilihan wilayah ini dilakukan secara purposif berdasarkan intensitas interaksi sosial, kejadian konflik horizontal, serta proyek pembangunan yang berdampak luas. Dalam membangun

argumen, peneliti mengutamakan pendekatan interpretatif yang menempatkan masyarakat adat bukan sekadar sebagai korban, melainkan sebagai aktor yang aktif merespons dan merumuskan identitasnya di tengah tekanan eksternal.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika lokal yang sering kali terabaikan dalam perumusan kebijakan nasional. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat menyajikan perspektif alternatif yang berbasis pada realitas masyarakat Papua Selatan sendiri, serta membuka ruang diskusi yang lebih kritis mengenai relasi antara negara, pembangunan, dan identitas kultural dalam konteks wilayah perbatasan dan pascakolonial.

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar konflik identitas yang terjadi di Papua Selatan serta menilai efektivitas strategi integrasi sosial yang telah diupayakan oleh berbagai pihak. Hasil temuan menunjukkan bahwa konflik identitas di wilayah ini bersifat multidimensional—tidak hanya berkaitan dengan perbedaan etnis dan budaya, tetapi juga disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap kekuasaan, sumber daya ekonomi, dan pengakuan identitas kolektif masyarakat adat.

Akar Konflik Identitas: Kompleksitas Historis dan Struktural

Konflik identitas yang terjadi di Papua Selatan tidak muncul dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari akar historis yang panjang dan ketimpangan struktural yang masih berlangsung hingga saat ini. Interaksi antara masyarakat adat dan kelompok pendatang telah berlangsung sejak dekade 1970-an melalui program transmigrasi pemerintah pusat. Namun, interaksi tersebut tidak selalu didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling pengertian.

Salah satu faktor utama yang memperparah ketegangan adalah dominasi kelompok pendatang dalam sektor ekonomi dan birokrasi. Di wilayah seperti Merauke, pendatang dari luar Papua lebih mudah mengakses jalur formal untuk membuka usaha, memperoleh izin, hingga mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan memperkuat perasaan tersingkir di kalangan masyarakat adat. Akibatnya, identitas etnis menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi struktural yang dianggap mengabaikan eksistensi lokal.

Situasi ini sejalan dengan konsep *symbolic boundary* dalam kajian sosiologi identitas, di mana batas-batas sosial terbentuk berdasarkan persepsi "kami" versus "mereka". Dalam banyak kasus, masyarakat adat merasa bahwa tanah mereka dikontrol oleh aktor-aktor luar, baik pemerintah maupun korporasi, yang hadir tanpa konsultasi yang bermakna. Ketika sumber penghidupan, seperti tanah ulayat dan hutan adat, digantikan oleh proyek food estate dan perkebunan sawit, konflik menjadi tak terhindarkan.

Selain faktor ekonomi, marginalisasi budaya lokal turut menyumbang pada krisis identitas. Bahasa daerah kian jarang digunakan di ruang publik maupun institusi pendidikan. Generasi muda Papua lebih akrab dengan Bahasa Indonesia dan media digital nasional daripada dengan bahasa dan simbol budaya komunitas mereka. Praktik-praktik adat seperti upacara Bakar Batu, permainan tradisional, dan musyawarah adat perlahan tergeser oleh gaya hidup urban dan modernisasi yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai lokal.

Konflik identitas juga menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu-isu politik seputar pemekaran wilayah dan pembagian kekuasaan di tingkat lokal. Meskipun pemekaran diharapkan membawa akses yang lebih luas terhadap pelayanan publik, dalam praktiknya tidak sedikit masyarakat yang merasa teralienasi karena posisi strategis pemerintahan tetap dikuasai oleh elite tertentu, sebagian besar bukan dari masyarakat adat. Ketimpangan ini memunculkan narasi eksklusif berbasis etnis, yang sering dimanfaatkan oleh aktor politik lokal untuk memperkuat dukungan dan memperjuangkan kepentingannya.

Upaya Integrasi Sosial dan Keterbatasannya

Pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil telah mencoba mengatasi ketegangan sosial melalui sejumlah program integrasi sosial. Salah satunya adalah penerapan pendidikan multikultural di beberapa sekolah di Merauke dan Boven Digoel, yang mengintegrasikan materi budaya lokal ke dalam kurikulum muatan lokal (mulok). Anak-anak diajarkan bahasa daerah, sejarah lokal, serta nilai-nilai adat. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi kendala serius, mulai dari kurangnya guru yang kompeten hingga minimnya dukungan dari institusi pendidikan nasional yang masih berorientasi homogen.

Upaya lain yang cukup menonjol adalah dialog antar komunitas yang difasilitasi oleh tokoh adat, tokoh agama, dan LSM seperti SKP KAMe dan Yayasan Teratai Hati Papua. Dialog ini berhasil meredakan beberapa konflik horizontal, seperti insiden antara pemuda lokal dan pendatang di Tanah Miring. Meski demikian, forum-forum ini belum menjadi mekanisme yang berkelanjutan karena masih tergantung pada kondisi keamanan dan belum diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah secara sistematis.

Di sisi pemberdayaan ekonomi, sejumlah program pelatihan keterampilan dan pembentukan koperasi adat telah dijalankan dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat lokal. Namun, program-program ini sering kali bersifat top-down, dirancang tanpa melibatkan komunitas dalam proses perencanaan. Akibatnya, sebagian besar program berumur pendek dan tidak berakar kuat dalam kebutuhan masyarakat.

Salah satu masalah mendasar yang belum terselesaikan adalah pengakuan atas hak tanah ulayat. Tanpa kejelasan hukum dan perlindungan formal, masyarakat adat kerap kehilangan tanah mereka karena proyek investasi yang dilakukan atas nama pembangunan. Sengketa tanah antara masyarakat dan investor terus terjadi, memperkuat rasa ketidakadilan dan memperlemah kepercayaan

masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketidakhadiran negara dalam menyelesaikan konflik agraria ini menjadi salah satu penyebab utama ketegangan antar kelompok.

Berbagai tantangan masih membatasi efektivitas integrasi sosial, antara lain:

Ketidapercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah.

Lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dan keterbatasan sumber daya manusia.

Konflik agraria yang belum terselesaikan secara adil.

Penggunaan politik identitas secara pragmatis oleh elite lokal maupun nasional.

Ketergantungan pada pendekatan pembangunan teknokratis yang kurang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Refleksi Teoretis dan Implikasi Sosial

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa konflik identitas tidak sekadar perbedaan budaya, melainkan merupakan gejala dari struktur sosial yang timpang. Dalam kerangka teori recognition (Taylor, 1994), konflik di Papua Selatan mencerminkan kegagalan negara dalam mengakui secara penuh identitas kolektif masyarakat adat sebagai bagian integral dari kebangsaan Indonesia. Ketika identitas lokal hanya dihargai secara simbolik dan tidak terakomodasi dalam sistem politik, ekonomi, dan pendidikan, maka integrasi sosial menjadi sulit tercapai.

Dengan demikian, integrasi sosial tidak dapat dipahami semata sebagai upaya harmonisasi relasi antarkelompok, tetapi harus dilihat sebagai proses politik dan budaya yang menuntut perubahan struktural. Integrasi sejati mensyaratkan redistribusi kekuasaan, rekognisi terhadap hak-hak kolektif, dan ruang partisipasi sejajar dalam semua aspek kehidupan berbangsa.

Evaluasi

Evaluasi terhadap berbagai upaya integrasi sosial di Papua Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar strategi yang telah dijalankan belum menyentuh akar persoalan struktural yang melatarbelakangi konflik identitas. Meskipun terdapat inisiatif-inisiatif yang patut diapresiasi seperti penerapan pendidikan multikultural, fasilitasi dialog antar komunitas, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, efektivitas dari program-program ini masih terbatas dalam skala, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang.

Salah satu kelemahan utama adalah pendekatan pembangunan yang masih bersifat top-down, di mana masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Banyak program dirancang oleh pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun lembaga donor, tanpa pemahaman mendalam terhadap konteks sosial-budaya lokal.

Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan program yang ditawarkan.

Dalam konteks pendidikan, meskipun muatan lokal mulai diperkenalkan di beberapa sekolah, kurikulum nasional tetap mendominasi dan belum memberi ruang yang cukup bagi penguatan

identitas budaya lokal. Kurangnya tenaga pendidik yang memahami bahasa dan budaya setempat juga menjadi kendala serius. Alhasil, pendidikan yang seharusnya menjadi alat integrasi, justru berisiko menjadi instrumen asimilasi budaya yang melemahkan identitas masyarakat adat.

Forum-forum dialog yang telah dibentuk oleh tokoh agama, tokoh adat, dan LSM memang berhasil meredam ketegangan dalam jangka pendek. Namun, minimnya dukungan regulasi, kelembagaan, dan pendanaan menyebabkan forum-forum tersebut tidak berfungsi secara berkelanjutan dan cenderung aktif hanya ketika terjadi konflik terbuka. Tidak adanya integrasi forum-forum ini ke dalam sistem pemerintahan daerah juga menyebabkan upaya rekonsiliasi sering bersifat ad hoc dan tidak memiliki daya dorong untuk mendorong perubahan kebijakan.

Dari aspek ekonomi, banyak program pemberdayaan masyarakat adat seperti pelatihan keterampilan atau pembentukan koperasi adat hanya berjalan sesaat karena kurangnya pendampingan dan akses pasar. Beberapa program bahkan berhenti pada tahap pelatihan tanpa ada keberlanjutan atau monitoring hasil. Ketergantungan pada pendekatan proyek jangka pendek justru memperkuat ketimpangan dan memperlemah kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Sementara itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah ulayat—yang merupakan elemen krusial dalam konflik identitas di Papua Selatan—masih menghadapi kendala serius. Meskipun terdapat inisiatif regulasi seperti Perda atau pengakuan komunitas adat, implementasinya berjalan lambat dan seringkali kalah oleh kepentingan investasi atau proyek pembangunan berskala besar seperti food estate. Hal ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan menambah kompleksitas konflik horizontal maupun vertikal.

Secara umum, evaluasi ini menegaskan bahwa strategi integrasi sosial yang tidak berbasis keadilan dan rekognisi hanya akan menghasilkan harmoni semu. Tanpa perubahan paradigma pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, strategi yang ada justru berisiko memperkuat dominasi kelompok tertentu atas yang lain.

Dengan demikian, ke depan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program-program integrasi sosial yang ada. Pendekatan berbasis komunitas (community-based approach), penguatan institusi adat, serta rekognisi kultural dan politik masyarakat adat harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan Papua Selatan yang inklusif, adil, dan damai.

SIMPULAN DAN SARAN

Konflik identitas yang terjadi di Papua Selatan merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui perbedaan etnis atau budaya semata. Ia merupakan hasil dari akumulasi ketidakadilan historis, marginalisasi struktural, dan kegagalan kebijakan pembangunan yang tidak mampu merespons

keragaman dan kebutuhan lokal secara tepat. Dominasi kelompok pendatang dalam sektor formal, peminggiran budaya dan bahasa lokal, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah memperdalam jurang pemisah sosial antara komunitas lokal dan pendatang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya integrasi sosial yang selama ini dilakukan, meskipun telah membawa beberapa kemajuan, masih belum cukup kuat untuk meredam konflik identitas secara mendasar. Strategi-strategi seperti pendidikan multikultural, forum dialog, pemberdayaan ekonomi, dan pengakuan hak atas tanah adat sering kali terhambat oleh pendekatan yang teknokratis, minimnya pelibatan masyarakat adat, dan lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Agar Papua Selatan dapat mewujudkan integrasi sosial yang sejati, diperlukan pergeseran paradigma dari pembangunan yang berorientasi proyek dan pertumbuhan semata menuju pembangunan yang berbasis pada keadilan sosial, rekognisi identitas budaya, dan partisipasi sejajar. Masyarakat adat harus diposisikan sebagai subjek aktif dalam seluruh proses pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan atau pelengkap administratif.

Kesuksesan integrasi sosial tidak dapat diukur hanya melalui ketiadaan konflik, tetapi melalui sejauh mana kebijakan publik dan struktur sosial mampu mengakomodasi keberagaman, menjamin keadilan akses terhadap sumber daya, dan menghormati eksistensi identitas kolektif masyarakat lokal. Dalam hal ini, rekognisi formal terhadap hak-hak adat, pendidikan yang inklusif dan kontekstual, serta forum-forum dialog yang berkelanjutan menjadi fondasi utama.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai relasi sosial di Papua Selatan dan menegaskan bahwa konflik identitas adalah gejala dari ketimpangan yang lebih dalam. Dengan pendekatan sosial-budaya dan politik yang tepat, diharapkan Papua Selatan tidak hanya menjadi wilayah administratif baru, tetapi juga menjadi ruang hidup yang adil dan damai bagi seluruh elemen masyarakatnya.

DAFTAR REFRENSI

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Selatan. (2024). Statistik penduduk dan migrasi Papua Selatan 2023. Merauke: BPS Papua Selatan.

Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan nationalism: History, ethnicity, and adaptation* (Policy Studies No. 14). East-West Center Washington.

Durkheim, É. (1984). *The division of labour in society* (W. D. Halls, Trans.).

Macmillan. (Original work published 1893)

Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2013). *A slow-motion genocide:*

- Indonesian rule in West Papua. *Griffith Journal of Law & Human Dignity*, 1(2), 142–165.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press.
- SKP KAMe. (2021). *Laporan tahunan situasi hak asasi manusia di wilayah selatan Papua*. Merauke: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke.
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton University Press.
- Widjojo, M. S. (2010). *Papua Road Map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*. Jakarta: LIPI Press.
- Yayasan Teratai Hati Papua. (2022). *Dialog damai dan rekonsiliasi sosial: Studi kasus Merauke dan Tanah Miring*. Jayapura: YTHP.